



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANGIM**
2. Jabatan : **HAKIM**
3. NHK : **87017**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. **320.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 469 m²/166 m² di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. Tanah Seluas 559 m² di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 559 m²/559 m² di PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. **194.000.000**

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000
5. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
6. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
8. MOTOR, YAMAHA 5D9 {VEGA RR} Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	40.800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	23.309.450
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	578.109.450
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	578.109.450

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.